



Nesting di bawah ART

Latar Belakang

ART hanya menerbitkan kredit karbon pada tingkat yurisdiksi, yaitu kepada pemerintah nasional atau pemerintah sub-nasional yang berskala besar. Hal ini penting tidak hanya untuk mencapai hasil dalam skala luas, tetapi juga karena pendekatan yurisdiksi memberikan insentif bagi pemerintah untuk meningkatkan tata kelola hutan: termasuk mengatur tata guna lahan, penegakkan hukum, mempromosikan program insentif kehutanan, serta mengakui hak-hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC).

Namun, pendekatan yurisdiksi tidak melarang pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mencapai target yang lebih ambisius. Dalam program REDD+ berbasis yurisdiksi, peran pemerintah diharapkan dan menjadi keharusan untuk memberikan pengawasan dan koordinasi, sedangkan perancangan dan implementasi dapat dilakukan bersama berbagai mitra, termasuk pemerintah daerah, masyarakat adat, komunitas lokal, dan sektor swasta.

Meskipun ART tidak secara langsung memberikan kredit untuk aktivitas di tingkat proyek, kegiatan tersebut tetap dapat diimplementasikan di bawah program REDD+ yurisdiksi melalui berbagai mekanisme. ART sepenuhnya mengakui peran penting proyek dalam mendukung pelaksanaan Strategi REDD+ berbasis Yurisdiksi. Misalnya, kegiatan di tingkat proyek dapat difokuskan pada wilayah-wilayah dengan tingkat deforestasi tinggi serta mengalokasikan modal dan sumber daya manusia secara lebih efisien untuk mengatasi ancaman langsung di area berisiko tinggi.

Integrasi aktivitas tingkat proyek ke dalam kerangka yurisdiksi secara luas disebut sebagai "*nesting*" (penyarangan). Istilah ini digunakan dalam berbagai cara, tetapi dalam konteks ART, *nesting* mengacu pada integrasi perancangan dan implementasi aktivitas REDD+ pada berbagai skala dalam suatu yurisdiksi guna menyelaraskan penghitungan aktivitas berskala kecil di tingkat proyek dengan sistem yurisdiksi dan pelaporan nasional.

TREES mencakup berbagai *safeguard* lingkungan dan sosial yang ketat. Namun, ART tidak menentukan cara pemerintah bekerja dengan masyarakat adat, komunitas lokal, atau sektor swasta. Sebaliknya, TREES memberikan fleksibilitas untuk mengakomodasi berbagai pendekatan *nesting* aktivitas tingkat proyek atau mekanisme pembagian manfaat yang paling sesuai dengan kondisi yurisdiksi setempat.

Setiap opsi yang disepakati oleh pihak terkait untuk *nesting* atau pembagian manfaat antara pemerintah dan entitas non-pemerintah—termasuk komunitas, organisasi masyarakat sipil, proyek, atau pemilik lahan individu—diperbolehkan dalam ART. ART tidak mengatur bagaimana hal ini dilakukan. Namun, penting dicatat bahwa semua kesepakatan harus memenuhi persyaratan TREES terkait *safeguard* lingkungan dan sosial, serta penghindaran ***double counting*** (penghitungan ganda) dan ***double issuance*** (penerbitan ganda).



Skenario Nesting - Bagaimana Penerapan Nesting dalam Praktiknya?

Terdapat beberapa skenario potensial *nesting* yang mungkin diterapkan. Bahkan, dalam satu yurisdiksi, memungkinkan beberapa skenario berbeda dapat digunakan secara bersamaan untuk tujuan yang berbeda. Dalam semua kasus, yurisdiksi yang berpartisipasi dalam ART harus mampu membuktikan hak atas kredit karbon atau manfaat dari kredit karbon agar kredit TREES dapat diterbitkan ke akun yurisdiksi tersebut di dalam registri ART.

Skenario 1: Yurisdiksi membuat kesepakatan dengan pemilik hak karbon atau penerima manfaat (misalnya Masyarakat Adat, komunitas lokal, pemilik lahan swasta, pengembang proyek, yurisdiksi administratif tingkat bawah, atau pihak lainnya). Yurisdiksi berpartisipasi dalam ART dan membagi sebagian dari kredit TREES, pendapatan karbon, atau manfaat lainnya kepada pemilik hak karbon sesuai atau penerima manfaat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Skenario 2: Yurisdiksi membuat kesepakatan dengan pemilik hak karbon atau penerima manfaat. Yurisdiksi berpartisipasi dalam ART namun mengizinkan kegiatan tingkat proyek untuk berpartisipasi dalam program Gas Rumah Kaca (GRK) selain ART. Namun, daripada menggunakan *baseline* berdasarkan metodologi proyek tersebut, proyek menggunakan *baseline* yang selaras dengan Tingkat Kreditisasi (*Crediting Level*) TREES. Sesuai dengan Bagian 13 TREES, ART akan mengurangi jumlah kredit yang telah diverifikasi ke proyek dari total kredit yang diterbitkan untuk yurisdiksi guna mencegah penerbitan ganda (*double issuance*).

Skenario 3: Yurisdiksi membuat kesepakatan dengan pemilik hak karbon atau penerima manfaat. Yurisdiksi berpartisipasi dalam ART tetapi mengizinkan kegiatan tingkat proyek untuk mengikuti program GRK lain dengan menggunakan pendekatan *baseline* sesuai program tersebut. Sesuai Bagian 13 TREES, ART akan mengurangi jumlah kredit yang telah diverifikasi proyek dari total kredit yurisdiksi untuk mencegah penerbitan ganda.

Skenario 4: Yurisdiksi tidak mencapai kesepakatan dengan pemilik hak karbon atau penerima manfaat karbon, dan pemilik tersebut memilih untuk berpartisipasi dalam program GRK lain. Yurisdiksi tetap berpartisipasi dalam ART, sementara kegiatan proyek mengikuti program lain dengan *baseline* sesuai aturan program tersebut. Mekanisme pengurangan kredit (untuk mencegah penerbitan ganda) mengikuti ketentuan yang sama seperti Skenario 3. Perhitungan di ART untuk Skenario 3 dan 4 identik.

Skenario 5: Yurisdiksi tidak mencapai kesepakatan dengan pemilik hak karbon atau penerima manfaat karbon, dan pemilik tersebut memilih untuk tidak berpartisipasi baik dalam ART maupun program GRK lain. Dalam kasus ini, yurisdiksi harus mengajukan (dan memvalidasi serta memverifikasi) metode alokasi Pengurangan dan Penyerapan Emisi TREES untuk lahan yang tidak tercakup dalam kesepakatan. Volume kredit yang terkait dengan lahan tersebut akan dikurangkan dari kredit yurisdiksi untuk menghormati hak atau manfaat karbon pemilik lahan.



Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah ART memperbolehkan proyek?

Ya. ART sepenuhnya mengakui peran penting aktivitas tingkat proyek dalam pelaksanaan Strategi REDD+ nasional. Meskipun ART tidak memberikan kredit langsung untuk aktivitas berskala proyek, kegiatan tersebut dapat diimplementasikan di bawah program REDD+ yurisdiksi melalui berbagai skenario, termasuk yang telah dijelaskan sebelumnya.

Apakah ART dapat melarang proyek berpartisipasi dalam program kredit GRK lain?

Tidak. ART tidak memiliki kewenangan untuk melarang aktivitas berskala proyek berpartisipasi dalam program kredit GRK lain, baik yang bersifat sukarela maupun wajib. ART juga tidak mengatur kesepakatan antara yurisdiksi dan aktivitas proyek.

Apakah kinerja yurisdiksi yang buruk, berdampak proyek yang di-*nesting* dan aktivitas REDD+ lainnya tidak akan menerima kredit?

Hal ini tidak ditentukan oleh ART, melainkan oleh kesepakatan antara yurisdiksi dan pemegang hak karbon atau manfaat karbon. Berdasarkan skenario *nesting* yang telah dijelaskan sebelumnya, kemungkinan dampaknya adalah:

Skenario 1: jika yurisdiksi secara keseluruhan mengalami kinerja yang buruk, jumlah kredit TREES atau pendapatan yang tersedia untuk dibagikan sesuai perjanjian pembagian manfaat dapat berkurang. Namun, perjanjian dapat dinegosiasikan untuk mengatasi kekhawatiran ini.

Skenario 2–4: Aktivitas proyek tidak terdaftar dalam ART, sehingga kinerja yurisdiksi mungkin atau mungkin tidak berdampak pada kinerja proyek, tergantung pada persyaratan dari program GRK yang digunakan oleh proyek tersebut.

Jika program GRK tidak mengharuskan *nesting*, maka kinerja yurisdiksi tidak akan mempengaruhi kinerja proyek.

Apakah pemangku kepentingan dengan hak karbon harus menyetujui ketentuan dengan yurisdiksi?

Tidak. ART tidak mewajibkan yurisdiksi memiliki hak atas seluruh Pengurangan dan Penyerapan Emisi (ERR) di wilayahnya. Pemangku kepentingan bebas bernegosiasi dengan yurisdiksi sesuai kesepakatan bersama.

Metode alokasi apa yang harus digunakan yurisdiksi?

TREES tidak menetapkan metode alokasi tertentu. Yurisdiksi dapat menggunakan alat yang telah dikembangkan bersama proyek, alat dari program GRK lain, atau pendekatan lainnya yang sesuai.



Haruskah perjanjian atau rencana berbagi manfaat dikembangkan secara partisipatif?

Ya. Perjanjian dan rencana berbagi manfaat harus disusun dan diimplementasikan melalui proses partisipatif, sesuai persyaratan *safeguard* TREES.

Bagaimana TREES mengatasi masalah tenure lahan?

Persyaratan *safeguard* TREES selaras dengan *Cancun Safeguards* UNFCCC untuk implementasi REDD+. Secara khusus, dalam hal hak atas tanah, *safeguards* TREES mengharuskan yurisdiksi yang berpartisipasi untuk:

1. Menjelaskan atau mendeskripsikan prosedur yang digunakan untuk pengakuan, inventarisasi, pemetaan, dan pengamanan hak tenure lahan/sumber daya (secara adat maupun hukum formal) di area implementasi REDD+.
2. Menunjukkan alokasi sumber daya untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Memastikan atau membuktikan bahwa pemangku kepentingan memiliki akses, penggunaan, dan kontrol atas lahan serta sumber daya sesuai hak mereka.

Kredit hanya akan diterbitkan jika yurisdiksi dapat membuktikan kepemilikan kredit atau hak menerima pembayaran/manfaat. Misalnya, jika hak atas ERR diberikan kepada pemilik lahan swasta, pemerintah perlu memiliki perjanjian dengan mereka untuk transfer hak kredit atau pembayaran.

Apakah ART benar-benar mewajibkan konfirmasi hak atas semua ERR?

Ya. Meskipun memerlukan upaya, persyaratan ini kritis untuk menjaga integritas TREES. Hak atas ERR atau manfaatnya akan diverifikasi selama proses validasi/verifikasi. Pembuktian hak diperlukan untuk semua kredit, terlepas dari penggunaannya, guna menjamin standarisasi program.

Mengapa persyaratan ART sama untuk kredit yang ditransfer/dijual dan pembayaran berbasis hasil? Tidak bisakah lebih longgar untuk kredit non-transaksi?

ART akan menerbitkan kredit karbon yang telah diberi nomor seri, yang mewakili satu metrik ton ekuivalen CO₂ yang direduksi atau diserap. Kredit karbon ini merupakan aset yang dapat diperdagangkan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, entitas yang menerima kredit harus dapat menunjukkan kepemilikan atas aset tersebut, terlepas dari sifat transaksi yang dilakukan.

ART menerapkan persyaratan yang sama untuk semua kredit guna melindungi hak pemilik lahan (dan mereka yang memiliki hak atas karbon). Misalnya, jika pemilik lahan memiliki hak atas ERRs, maka secara hukum pemilik lahan harus menerima pembayaran atas hasil atau kredit dari aktivitas di lahan tersebut. Jika ART menerbitkan kredit langsung kepada pemerintah yang tidak memiliki hak kepemilikan yang jelas, maka hal ini dapat merugikan pemilik lahan karena:

- Haknya atas kredit TREES dan pembayaran yang terkait menjadi tidak diakui.
- Haknya untuk mendaftarkan manfaat ERRs pada program GRK lain menjadi terancam, yang dapat menyebabkan penerbitan ganda (*double issuance*).